

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 02 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I2.3762](https://doi.org/10.36859/JP.V2I2.3762)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 18 Juni 2025

Accepted : 27 Juni 2025

Published : 30 Juni 2025

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

TENTANG PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA DALAM

MENGURANGI PENGANGGURAN DI DESA SARIWANGI

KECAMATAN PARONGPONG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Syifa Nur Rohimah¹⁾, Dadan Kurnia²⁾, Noer Apptika Fujilestari³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 menetapkan Dana Desa tahun 2018 diprioritaskan untuk Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) guna mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi PKTD di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, menilai dampaknya terhadap pengangguran, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung di lokasi (field research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKTD di Desa Sariwangi telah berjalan cukup baik, ditandai dengan komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, program ini belum mampu secara signifikan menekan angka pengangguran karena keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya daya serap tenaga kerja. Hambatan utama meliputi keterlambatan informasi, minimnya pelatihan, kendala dalam pengelolaan anggaran dan distribusi material, serta prosedur birokrasi yang masih kompleks. Diperlukan penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas pelaksana, dan transparansi dalam pengelolaan agar efektivitas program dapat ditingkatkan dan tujuan utama PKTD untuk mengurangi pengangguran di desa dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi, Padat Karya Tunai Desa, Pengangguran

Abstract

Ministerial Regulation No. 19 of 2017 by the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration prioritized the use of 2018 Village Funds for the Cash-for-Work (PKTD) Program. This initiative aims to create jobs and reduce unemployment in rural areas. This study focuses on the implementation of the PKTD program in Sariwangi Village, Parongpong District, West Bandung Regency. It examines how the program is executed, its impact on unemployment, and the challenges faced during implementation. The research uses a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and direct field documentation. The findings show that the PKTD program in Sariwangi Village has been implemented fairly well, especially in terms of communication between the village government and the local community. However, it has not significantly reduced unemployment due to limited job opportunities and low labor absorption compared to the number of unemployed.

Several obstacles were identified, including delays in information dissemination, lack of training, difficulties in budget management and material distribution, and complicated bureaucratic procedures. To enhance the program's effectiveness, it is necessary to simplify administrative procedures, improve the capacity of local implementers, and increase transparency. These efforts are essential to ensure the program better contributes to reducing unemployment in rural areas.

Keywords: Implementation, Village Cash Labor Intensive, Unemployment

PENDAHULUAN

Rakyat adalah bagian penting dari suatu negara. Negara yang telah berdiri harus menjamin kesejahteraan setiap warganya secara merata, begitu juga Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan 38 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Karena itu, akan sulit bagi pemerintah untuk mengawasi dan menjamin kesejahteraan rakyat secara keseluruhan jika pemerintah pusat hanya bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan di daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk membuat kebijakan dapat diterapkan dengan lebih mudah dan cepat di daerah.

Otonomi daerah diadakan agar setiap daerah dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri, sehingga diharapkan bisa lebih mengerti akan kebutuhan dari masyarakat. Setiap provinsi terdiri dari beberapa daerah terkecil yang disebut desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 disebutkan bahwa: "Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur, dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat 4 disebutkan juga bahwa tugas kepala desa yaitu: "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa" Pengembangan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga tugas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah Apabila hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, maka tingkat perekonomian di setiap daerah tidak akan merata. Daerah yang memiliki fasilitas penunjang seperti sarana prasarana

serta sumber daya berkualitas akan memiliki taraf hidup yang baik. Keadaan ini apabila dibiarkan akan menimbulkan kecemburuhan serta kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Peran pemerintah daerah dibutuhkan untuk memantau keadaan di setiap daerah dan memfasilitasi agar terjadi pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa. Pengembangan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perlu melibatkan masyarakat secara keseluruhan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di berbagai bidang.

Banyaknya permasalahan perekonomian yang ada di Indonesia menyebabkan negara ini menjadi negara yang kurang pesat dalam membangun pertumbuhan ekonomi dikarenakan masih banyaknya penduduk Indonesia yang mengalami kemiskinan, pendidikan yang rendah, pengangguran terbuka, dikarenakan pengangguran yang ada di Indonesia setiap tahun meningkat yang di sebabkan pula karena banyaknya penduduk yang belum memiliki pekerjaan sedangkan lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah belum seimbang dengan yang melamar pekerjaan.

Saat ini permasalahan ekonomi di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pembangunan masih menjadi salah satu masalah yang perlu di selesaikan di negeri ini. Permasalahan tersebut terjadi di berbagai penjuru daerah baik kota maupun desa. Saat ini desa masih sangat melekat dengan permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan sosial yang rendah.

**Gambar 1.1 Data Jumlah Penduduk Miskin Desa Sariwangi
Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat
(Tahun 2021 – 2023)**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2021	6.012 JIWA
2	2022	6.126 JIWA
3	2023	7.971 JIWA

Sumber: Kantor Desa Sariwangi diolah tahun 2023

Dari data tersebut untuk Desa Sariwangi jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 6.012 jiwa sedangkan pada tahun 2022 sebesar 6.126 jiwa dan pada tahun 2023 sebesar 7.971. Dilihat dari jumlah penduduk miskin di desa Sariwangi Kecamatan Parongpong yang selalu

meningkat setiap tahun nya itu menunjukan bahwa penduduk miskin di Desa Sariwangi masih menjadi masalah yang cukup serius untuk ditangani oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat jumlah penduduk miskin di Desa Sariwangi masih cukup tinggi oleh karena itu pemerintah menerapkan kebijakan padat karya tunai desa, di Kabupaten Bandung Barat terdapat 165 desa dan desa Sariwangi merupakan salah satu desa yang menerapkan kebijakan padat karya tunai desa.

Untuk mengatasi kesenjangan ini pemerintah menggulirkan program dana desa yang setiap tahunnya mengalami kenaikan signifikan, Program desa merupakan suatu langkah desa dalam memajukan perekonomian dan perkembangan desa. Dalam mengembangkan desa, kepala desa beserta perangkat desa akan mendiskusikan suatu program-program yang dapat membentuk perkembangan desa, program ini akan di publikasikan kemasyarakatan. Dampak dari program desa dapat dilihat dari segi positifnya, seperti mampu meningkatkan sistem perekonomian masyarakat desa dan mampu meningkatkan perkembangan desa.

Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama disetiap negara di dunia khususnya dinegara yang sedang berkembang. Kedua masalah tersebut merupakan satu kesatuan yang keduanya menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan antar satu dengan yang lainnya. Dualisme tersebut terjadi jika pemerintah tidak mampu dalam memanfaatkan dan miminimalkan dampak yang diakibatkan dari dua persalah tersebut dengan baik. Namun jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan.

Dalam hal ini pemanfaatan tenaga kerja secara maksimal wajib dilakukan oleh pemerintah, jika pemerintah ingin *survive* dalam pembangunan, jika tidak perlahan tapi pasti bertambahnya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap (pengangguran) akan menjadi beban dan penghambat dalam dalam perekonomian dan pada akhirnya menjadi masalah. Selain menjadi beban dan penghambat dalam pertumbuhan

perekonomian suatu negara, pengangguran juga digunakan menjadi salah satu indikator dari pasar tenaga kerja yang ada. Rendahnya pengangguran sering dianggap menjadi suatu prestasi dalam suatu negara demikian juga sebaliknya.

**Gambar 1. 2 Data Tingkat Pengangguran Desa Sariwangi
Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat
(Tahun 2021-2023)**

NO	NAMA RW	2021			2022			2023		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	RW.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RW.002	10	4	14	8	7	15	11	8	19
3	RW.003	52	21	73	48	15	63	50	21	71
4	RW.004	23	9	32	12	7	19	8	5	13
5	RW.005	48	25	73	40	17	57	35	20	55
6	RW.007	12	6	18	9	3	12	4	2	6
7	RW.008	49	16	65	37	23	60	42	25	67
8	RW.009	51	26	77	47	30	77	36	34	70
9	RW.010	30	11	41	14	8	22	16	11	27
10	RW.011	24	19	43	32	21	53	29	15	44
11	RW.012	54	20	74	59	24	83	61	22	83
12	RW.013	35	17	52	24	12	36	19	7	26
13	RW.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	RW.015	28	21	49	31	16	47	29	20	49
15	RW.016	3	1	4	1	1	2	2	3	5
TOTAL		419	196	615	362	184	546	342	193	535

Sumber: Kantor Desa Sariwangi diolah tahun 2023

Menurut data tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka Desa Sariwangi tercatat sebesar 615 orang di tahun 2021, atau mengalami perubahan menjadi 546 pada tahun 2022 dan menurun kembali sejumlah 535 di tahun 2023, Penurunan TPT tersebut menunjukkan lapangan pekerjaan di Desa Sariwangi sudah membaik meskipun belum sepenuhnya pulih.

Pada dasarnya padat karya bukanlah istilah baru di bangsa Indonesia. Bahkan sejarah mencatat padat karya merupakan salah satu pilar yang menyukseskan pembangunan Indonesia pada masa sebelumnya khususnya dalam program swasembada pangan. Saat ini pun, padat karya masih dilaksanakan pada berbagai program pemerintah dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang banyak menghasilkan infrastruktur kebutuhan dasar bagi masyarakat, khususnya di perdesaan. Kesuksesan ini pula yang menjadi daya pikatnya sehingga Pemerintah Indonesia

menggiatkan dan mencanangkan kembali padat karya pada program pembangunan nasional di tahun 2018 dengan nama Padat Karya Tunai.

Peraturan teknis yang mendasari program PKTD ini adalah surat keputusan bersama atau SKB 4 menteri tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014. Peraturan tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk pedoman umum pelaksanaan PKTD dan penggunaan dana desa tahun 2018 untuk padat karya tunai, sedangkan ketentuan pelaksanaan penggunaan dana desa untuk PKTD mengacu pada Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahun berubah. PKTD ialah suatu program bantuan yang dikemas dalam suatu bentuk pemberdayaan bagi masyarakat dengan balita gizi buruk penganggur miskin secara swakelola melalui pemanfaatan tenaga kerja, teknologi, sumber daya alam local dalam rangka mengurangi kemiskinan, menurunkan *stunting* dan meningkatkan pendapatan. Program PKTD ini sering disebut bantuan yang bermartabat karena bantuan yang diberikan tidak asal, masyarakat perlu bekerja terlebih dahulu untuk mendapatkan haknya. (Setiawan, 2022: 665-80)

Dengan Program Padat Karya Tunai dalam pelaksanaan dana Desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Di desa Sariwangi Program Padat Karya Tunai sudah berjalan dari tahun 2018 hingga saat ini, Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa, mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Pendanaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% dari dana kegiatan PKTD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Informan meliputi Sekretaris Desa Sariwangi, Kepala Seksi Pelayanan Desa Sariwangi, Kepala Urusan Tata Usaha Desa Sariwangi, Staf Keuangan Desa sariwangi, Ketua RW dan Masyarakat Desa Sariwangi.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Padat Karya Tunai Desa Dalam Mengurangi Pengangguran Di Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat

Dalam pembahasan ini, peneliti mendeskripsikan mengenai Kebijakan Pemerintah Tentang Program Padat Karya Tunai Desa di Desa Sariwangi berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada informan yang telah peneliti lakukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan Teori George Edward III (Agustino 2014: 149) yang menyatakan bahwa dalam implementasi penting untuk memperhatikan 4 hal, yaitu:

Komunikasi

Komunikasi program Padat Karya Tunai merupakan penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan dan diefektifkan lagi dengan disampaikan juga kepada kelompok sasaran kebijakan serta pihak lain yang berkepentingan.

Informasi mengenai PKTD disampaikan secara langsung kepada masyarakat dalam forum Musdes, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai program tersebut. Mengandalkan Musdes sebagai saluran sosialisasi menunjukkan pentingnya forum ini dalam komunikasi program. Penting untuk memastikan bahwa Musdes diorganisasi dengan baik dan melibatkan semua pihak terkait untuk efektivitas penyampaian informasi. Mengadakan sosialisasi segera setelah keputusan dari pemerintah kabupaten memastikan bahwa informasi

yang diterima masyarakat adalah yang terbaru dan relevan. Melibatkan masyarakat dalam Musdes untuk menerima informasi mengenai PKTD dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program. Penting bagi pihak aparatur desa untuk terus memperhatikan dan meningkatkan cara sosialisasi agar informasi mengenai PKTD dapat tersampaikan dengan baik dan efektif ke seluruh masyarakat desa.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program dirumuskan tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai maka kebijakan akan kesulitan dalam mengimplementasikannya.

Permodalan atau anggaran yang diberikan untuk program Padat Karya Tunai Desa ini hanya berasal dari desa. Anggaran untuk Program Padat Karya Tunai sudah ditetapkan secara terperinci dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan program. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan plot yang jelas untuk berbagai program, yang menunjukkan adanya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang sistematis dan terstruktur.

Dana untuk program tersebut berasal dari pemerintah pusat, dan ini merupakan standar yang diterapkan di seluruh Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Desa Sariwangi mengikuti regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan pedoman nasional. Upaya memaksimalkan penggunaan dana menunjukkan komitmen untuk efisiensi dan efektivitas. Ini berarti bahwa Desa Sariwangi berusaha menggunakan anggaran yang tersedia dengan cara yang paling optimal untuk mencapai hasil terbaik dari program tersebut.

Desa Sariwangi memiliki sistem pengelolaan anggaran yang baik dan sesuai dengan regulasi pemerintah pusat. Mereka berusaha memanfaatkan dana yang ada secara maksimal dan mengikuti standar nasional, yang mendukung pelaksanaan Program Padat Karya Tunai secara efektif.

Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Pelaporan mengenai program dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program dikelola dengan baik dan informasi mengenai penggunaan dana dapat diakses oleh publik. Transparansi ini berkontribusi pada kepercayaan masyarakat terhadap program. Program Padat Karya Tunai Desa memiliki manfaat yang signifikan, terutama dalam mengatasi pengangguran di Desa Sariwangi.

Komitmen yang menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya mendukung program secara teoritis, tetapi juga aktif dalam pelaksanaan dan sosialisasi program kepada masyarakat. Ini adalah indikator penting dari efektivitas implementasi program. Dukungan dan apresiasi dari pihak pemerintah desa menunjukkan bahwa mereka memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan program. Ini termasuk menyosialisasikan manfaat program dan menjaga agar program tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sariwangi, melalui Ibu Dinar Febrina dan Bapak Agus Hermawan, memberikan dukungan yang kuat dan komitmen terhadap Program Padat Karya Tunai Desa. Transparansi dalam pelaporan dan keyakinan pada manfaat program menjadi aspek kunci dalam pelaksanaan program ini, yang bertujuan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan perekonomian desa.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini dapat meliputi struktur organisasi, mekanisme, standar operasional prosedur, serta pembagian kerja. Ini menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan karena dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Struktur birokrasi pada Program Padat Karya Tunai Desa di Desa Sariwangi menunjukkan beberapa elemen kunci, Dukungan kuat dari

pimpinan desa, termasuk kepala desa, Kasi Pelayanan, dan Sekretaris Desa, sangat penting untuk kesuksesan program. Struktur birokrasi yang transparan dan akuntabel mendukung pelaksanaan program dengan baik dan memastikan kepercayaan masyarakat. Koordinasi yang baik dan proses administratif yang terorganisir memfasilitasi pelaksanaan program secara efektif. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku mencerminkan struktur birokrasi yang mematuhi hukum. Secara keseluruhan, struktur birokrasi yang terorganisir dan mendukung, serta kepatuhan terhadap regulasi, memainkan peran krusial dalam memastikan efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa di Desa Sariwangi.

Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Program Padat karya Tunai Desa

Padat Karya Tunai Desa di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap manfaat dan tujuan program. Selain itu, keterbatasan data dan dokumentasi terkait pelaksanaan program menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal evaluasi dan pengukuran dampak terhadap pengurangan pengangguran. Koordinasi yang belum optimal antara pemerintah desa, dinas terkait, dan masyarakat juga menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan secara menyeluruh. Di sisi lain, anggaran yang terbatas seringkali tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sementara kualitas sumber daya manusia yang rendah turut membatasi jenis kegiatan padat karya yang dapat dilakukan.

Hambatan teknis di lapangan seperti kondisi geografis, cuaca, serta keterbatasan sarana dan prasarana juga turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Selain itu, kurangnya pengawasan dan evaluasi menyebabkan program berjalan kurang optimal dan berisiko mengalami penyimpangan. Dalam konteks penelitian, pengumpulan data primer pun menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam mewawancarai informan kunci, baik dari pihak aparat desa, pelaksana program, maupun masyarakat penerima manfaat. Hambatan-hambatan tersebut perlu menjadi perhatian

serius agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang nyata dalam mengurangi pengangguran di tingkat desa.

Upaya Dalam Implementasi Kebijakan Program Padat karya Tunai Desa

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa, diperlukan sejumlah upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pertama, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara intensif agar mereka memahami manfaat program serta terdorong untuk berpartisipasi aktif. Kedua, pemerintah desa perlu memperbaiki sistem dokumentasi dan pencatatan data agar pelaksanaan program dapat dievaluasi secara objektif dan transparan. Ketiga, koordinasi antar lembaga, termasuk antara pemerintah desa, kecamatan, dan dinas terkait harus diperkuat melalui forum komunikasi rutin dan pembagian tugas yang jelas.

Selanjutnya, untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah desa dapat mengupayakan sinergi dengan program lain atau sumber dana tambahan, seperti bantuan dari pemerintah kabupaten atau program CSR perusahaan di sekitar wilayah tersebut. Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas melalui pelatihan kerja atau kegiatan pemberdayaan agar masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan padat karya. Upaya teknis seperti perbaikan sarana prasarana pendukung serta perencanaan kegiatan yang mempertimbangkan kondisi geografis dan cuaca setempat juga penting dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan program.

Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi internal melalui pembentukan tim pengawas desa dapat meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan program berjalan sesuai rencana. Dalam konteks penelitian, peneliti juga dapat membangun komunikasi yang baik dengan aparat desa dan tokoh masyarakat untuk mempermudah proses pengumpulan data primer. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan hambatan yang muncul dapat diatasi secara bertahap sehingga program

padat karya benar-benar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi tingkat pengangguran di Desa Sariwangi.

KESIMPULAN

Berdasarkan teori pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan Padat Karya Tunai dalam Mengurangi Pengangguran di Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dapat ditarik kesimpulan bahwa telah memberikan dampak positif dalam mengurangi tingkat pengangguran di desa tersebut. Namun, keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada dimensi-dimensi yang ada antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, yaitu:

Untuk Dimensi Komunikasi yakni komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Di Desa Sariwangi, komunikasi melalui pertemuan, penyuluhan, dan sosialisasi telah membantu masyarakat memahami program dengan lebih baik dan mengurangi kesalahpahaman. Selain itu, koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga terkait, seperti dinas tenaga kerja, juga berjalan lancar untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Namun, beberapa hambatan komunikasi masih ada, seperti keterlambatan informasi dan ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan kenyataan di lapangan. Beberapa warga juga merasa kurang mendapat informasi yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka dalam program. Meskipun media sosial dan teknologi dapat mempercepat aliran informasi, pemanfaatannya di Desa Sariwangi masih terbatas, yang menjadi tantangan dalam memperluas jangkauan informasi, terutama untuk warga yang kurang terpapar teknologi.

Untuk Dimensi Sumber Daya yakni, Ketersediaan dan kualitas SDM, baik pemerintah desa maupun masyarakat setempat, sangat penting untuk kelancaran program. Meskipun tenaga kerja berasal dari warga lokal, pelatihan keterampilan yang lebih intensif dan berkelanjutan masih diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kerja dan produktivitas. Pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah cukup mendukung, tetapi pengelolaan anggaran masih menghadapi tantangan, seperti keterlambatan proyek dan penggunaan dana yang tidak optimal. Perbaikan dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran diperlukan untuk memastikan dana digunakan secara efisien. Ketersediaan material juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program. Meskipun sebagian besar material sudah tersedia, masalah kekurangan bahan dan keterlambatan distribusi pernah menghambat pelaksanaan. Koordinasi yang lebih baik dengan penyedia material diperlukan untuk memastikan kelancaran kegiatan.

Untuk Dimensi Disposisi yakni Komitmen pemerintah desa terhadap Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program di Desa Sariwangi. Aparat desa menunjukkan dukungan penuh dalam perencanaan, koordinasi, dan pemantauan, meskipun keterbatasan sumber daya dan waktu sering menghambat pelaksanaannya. Sikap masyarakat umumnya mendukung program karena melihatnya sebagai peluang kerja. Namun, sebagian kecil masyarakat belum

memahami sepenuhnya mekanisme program, yang menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih intensif. Keterlibatan pihak terkait, seperti dinas terkait dan penyedia material, juga menunjukkan disposisi positif, meskipun terkadang ada ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, seperti keterlambatan distribusi material. Hal ini memerlukan peningkatan koordinasi untuk kelancaran program. Tantangan utama terkait disposisi adalah ketidakselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan, sering kali disebabkan oleh kurangnya motivasi atau keterbatasan pengetahuan teknis. Namun, sikap positif dari pemerintah desa dan masyarakat membantu program berjalan dengan baik.

Untuk Dimensi Birokrasi, Struktur birokrasi di Desa Sariwangi cukup jelas, dengan pembagian tugas antara kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa dalam merencanakan dan melaksanakan PKTD. Namun, kapasitas birokrasi yang terbatas dan kurangnya pelatihan aparatur desa mengakibatkan kendala dalam administrasi dan pelaporan. Prosedur administrasi yang ada sudah ditetapkan, tetapi sering kali menyulitkan kelancaran pelaksanaan, terutama dalam pengajuan anggaran, pencairan dana, dan pelaporan. Simplifikasi prosedur diperlukan untuk meningkatkan responsivitas birokrasi. Koordinasi antara pemerintah desa, dinas terkait, dan lembaga penyedia material sudah cukup baik, namun terkadang terdapat keterlambatan dalam distribusi material dan dukungan teknis, yang menghambat pelaksanaan program. Tantangan terbesar dalam birokrasi adalah ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan implementasi di desa, yang sering kali memperlambat proses. Masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga perlu segera diatasi untuk mencegah penyalahgunaan dana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm: 128
- Adib. *Padat Karya Tunai Desa*. Yogyakarta: deepublish, 2020.
- Awang Azam. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Gulo. (2010). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Grasindo Hlm: 78
- Iskandar Putong (2010). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Moleong, Laxi J. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Hlm:

Mulyadi, Deddy, (2015), *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta Hlm: 45

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia Hlm: 43

Poerwadarminta, W.J.S. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Hlm: 141

Salam, Darma Setiawan (2007). *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta Hlm: 23

Subarsono, A.G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm: 93

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharno. (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak. Hlm: 176-177

Syafie, Inu Kencana. (2007). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama Hlm: 23

Tahir, Arifin. (2015). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta, 55

Jurnal/Skripsi

Budiasa, A. A. G. R., Raka, A. G., & Mardika, I. M. (2019). *Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar*. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 71-82.

Deni Herdiyana, *Implementasi Padat Karya Tunai Dalam Menurunkan Penduduk Miskin Di Pedesaan Provinsi Lampung Dan Riau*, Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi 16, no. 02 (2019): 175–87

Franita, Riska. *Analisa Pengangguran Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 1, no. 3 (2016): 88–93

Hajar Risa, Badaruddin Badaruddin, and Munir Tanjung, *Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa Dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading*, Perspektif 10, no. 2 (2021): 739–53.

Kinanti, Cindy Sangri. *Analisis Tentang Setengah Penganggur Di Indonesia : Antara Sukarela Dan Keterpaksaan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB [Universitas Brawijaya] 3, no. 1 (2014): 1–22.

Manembu, R. R., Kusen, A. W., & Deeng, D. (2019). *Padat Karya Sebagai Kontribusi Kehidupan Masyarakat pada Penggunaan Dana Desa* (Studi Kasus Desa Kaneyan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan). *Holistik, Journal of Social and Culture*, no. 2 (2019): 1–21.

Muhammad Yusril Amar Setiawan and Suci Megawati, *Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*, Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik 10, no. 2 (2022): 665–80.

Muslim, Mohammad Rifqi. *Pengangguran Terbuka Dan Determinannya*. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* Volume 15, Nomor 2 15, no. 2 (2014): 171–81

Nurjihadi, M. *Strategi Pengembangan Program Padat Karya Tunai Desa (Pktd) Dengan Pendekatan Analisis Swot Di Desa Stowe Brang Kecamatan Utan*. Jurnal TAMBORA 4, no. 2A (2020).

Setiawan, Muhammad Yusril Amar, and Suci Megawati. *Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Pekarungan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. Publika: *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 10, no. 2 (2022): 665–80.

Setyawan, Dody, and Nanang Bagus Srihardjono. *Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang*. *Jurnal Reformasi* 6, no. 2 (2016): 125–33.

Sirajuddin, I. A. (2016). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1–14.

Suhandi, Hendra Wijayanto, and Samsul Olde. *Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia*. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 13, no. 1 (2020): 85–94.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pedesaan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi
Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Pokus
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

Internet

<https://bandungbaratkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/a3256f712908489e80dcee85/kabupaten-bandung-barat-dalam-angka-2022.html>.

Diakses pada tanggal 24 September 2023, pukul 19.00 WIB.

<https://updesa.com/permendesa-pdtt-no-13-tahun-2023/>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 13.30 WIB.